

Bab 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Sebagai realisasi dari pelaksanaan sistem otonomi daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keleluasaan dalam mengefisiensi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang merupakan potensi utama dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Salah satu implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan masing-masing regional wilayah adalah dengan meningkatkan stabilitas pembangunan melalui optimalisasi kemampuan keuangan daerah terkait pembiayaan/pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menyikapi otonomi daerah akan meningkatkan *local accountability* pemerintah terhadap masyarakat. Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (berasaskan keadilan) di seluruh wilayah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah, dan
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik hingga ke pemerintah daerah tingkat II karena memiliki informasi yang lengkap.

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah untuk peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang didasari dengan asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut akan berimbas pada sistem penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam konteks otonomi daerah karena akan dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan produk unggulan masing-masing daerah.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:



1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah terutama dalam penyusunan program dan kegiatan yang relevan dengan pendanaan pagu indikatif daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020, perlu menekankan program dan kegiatan periode sebelumnya yang memiliki kekuatan lebih dalam pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat program dan kegiatan terkait arah kebijakan yang disusun harus memiliki keterkaitan dengan perencanaan tahun sebelumnya terutama yang terkait pendanaan. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan tahun 2015 akan menjadi acuan dasar dalam melanjutkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah daerah periode selanjutnya.

Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stakeholder* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (pembangunan nasional).

Analisis ekonomi makro daerah akan menjadi penunjang dalam mengkaji dan mengevaluasi kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar dalam memproyeksikan kondisi perekonomian tahun 2016 untuk memberikan gambaran awal pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait perekonomian mikro yang merupakan *basic* dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2016 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.



3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang diambil haruslah melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah termasuk dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan asumsi perencanaan pembangunan daerah.

3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

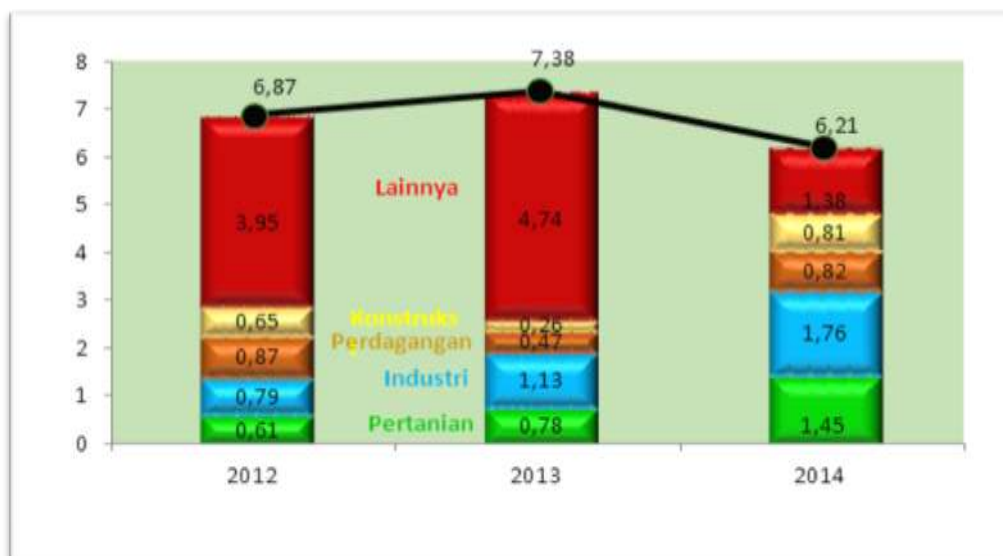
Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB terutamacapaian PDRB pada 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Pengadaan listrik dan gas;
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) *Real estate*
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17) Jasa Lainnya

a) Struktur Ekonomi

Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,21 persen, dipengaruhi oleh tren kondisi perekonomian global dan nasional yang cenderung membaik. Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usaha, Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,07 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 12,16 persen dan Informasi Komunikasi sebesar 12,08 persen. Struktur perekonomian Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,50 persen), Industri Pengolahan (16,10 persen) dan Pertambangan dan Penggalan (13,15 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2014, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,76 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, Perikanan 1,45 persen.

Gambar 3.1
Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha (%)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 - 2014



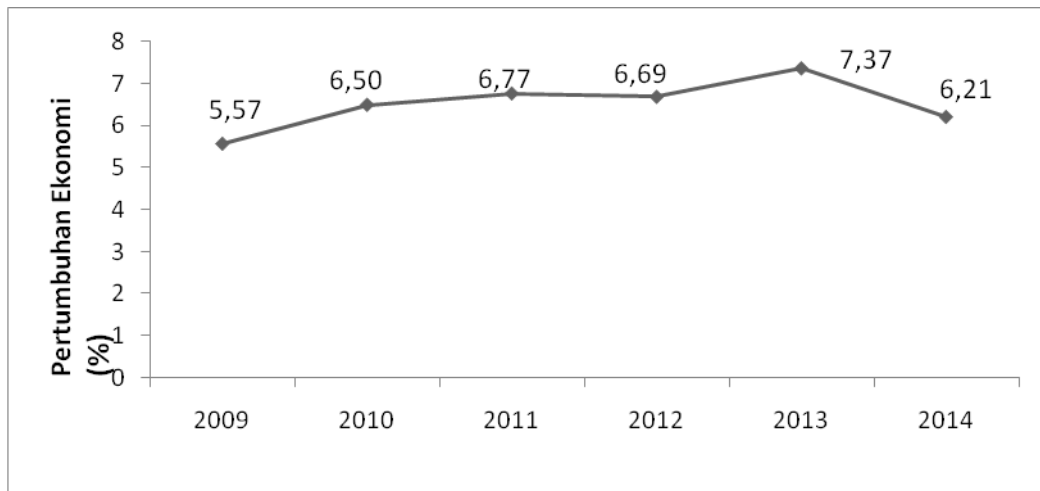
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

b) Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,21 persen, dipengaruhi oleh tren kondisi perekonomian global dan nasional yang cenderung membaik.



Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2009-2014 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Triw IV-2014 terhadap Triw IV-2013	Laju Pertumbuhan 2014	Sumber Pertumbuhan 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,71	6,71	1,45
2.	Pertambangan dan Penggalian	-7,61	-2,87	-0,53
3.	Industri Pengolahan	12,04	12,16	1,76
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	42,24	16,07	0,01
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	4,78	4,47	0,00
6.	Konstruksi	7,98	9,92	0,81
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	8,18	7,68	0,82
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,28	2,14	0,13
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,53	8,21	0,13
10.	Informasi dan Komunikasi	13,44	12,08	0,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,15	6,66	0,22
12.	Real Estate	7,43	7,11	0,14
13.	Jasa Perusahaan	4,23	4,54	0,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,88	8,86	0,50
15.	Jasa Pendidikan	6,04	9,67	0,40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,58	8,86	0,15
17.	Jasa Lainnya	8,88	8,86	0,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,25	6,21	6,21



Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 0,31 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal ini didorong oleh efek musiman beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seperti padi yang memasuki musim tanam serta sawit dan karet yang menurun produksinya karena proses panen yang terkendala akibat musim penghujan menjadikan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami kontraksi 7,33 persen. Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mengalami kontraksi sebesar 0,52 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 terjadi pada seluruh komponen. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,83 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,30 persen. Struktur Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2014 menurut pengeluaran didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (45,03 persen), diikuti Komponen Ekspor (42,99) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (42,54 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2014, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,04 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,63 persen.

3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan tahun 2016

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukkan melalui perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah selama beberapa periode serta melihat laju pertumbuhan ekonomi baik makro maupun sektoral. Target dan capaian Indikator makro pembangunan daerah tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2011-2014

Indikator	2011		2012		2013		2014	
	Target Capaian	Realisasi	Target Capaian	Realisasi	Target Capaian	Realisasi	Target Capaian	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pertumbuhan PDRB (%)	6,7	6,77	6,9	6,69	7,1	7,37	7,3	6,21
Laju Inflasi Prov (%)	6,0	4,55	5,0	5,85	4,0	6,79	3,0	7,07
PDRB Per kapita (Juta Rp.)	18,5	21,56	21,0	31,52	24,0	34,35	27,5	36,83
Angka Kemiskinan	4,5	6,58	3,5	6,19	3,0	6,23	2,5	6,07
Tingkat Pengangguran terbuka	3,5	2,55	3,0	3,17	2,75	3,09	2,5	3,24



Pada tahun 2015 dan 2016, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh eksternal berupa perkembangan ekonomi nasional dan global. Beberapa tantangan tersebut antara lain menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan harga pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, percepatan pengurangan kemiskinan, menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian inflasi, serta perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan I-2015 diproyeksi tumbuh sebesar 7,2 hingga 7,7 persen (ctc). Rencana pembangunan beberapa infrastruktur terkait pengalihan subsidi BBM dan trend membaiknya perekonomian global akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada Tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dipengaruhi oleh masih rendahnya pengeluaran rumah tangga dan pemerintah di awal tahun serta investasi swasta yang cenderung rendah karena baru memasuki tahap perencanaan. Dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 sesuai perumusan dalam dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan prospek ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dapat mencapai target-target yang telah ditentukan.

Indikator ekonomi lainnya yang penting bagi perkembangan ekonomi daerah adalah laju inflasi. Di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai inflasi dihitung dari pembentukan inflasi dua kota yaitu Palangka Raya dan Sampit. Perhitungan nilai inflasi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan gabungan dari dua kota tersebut yang diasumsikan dapat menggambarkan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah secara umum. Adapun perkembangan inflasi selama tahun 2007-2014 dan target pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2015 (%)

Keterangan (inflasi yoy)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Inflasi Tahunan Palangka Raya	7,96	11,65	1,39	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	5,09
Inflasi Tahunan Sampit	7,58	8,89	2,85	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	6,85
Inflasi Kalimantan Tengah*	7,79	10,44	2,02	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	5,71
Inflasi Nasional	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79	4,3	8,38	8,36	6,79

*) Inflasi Kalteng Tahun Dasar 2007 dihitung dan dipublikasikan BPS sejak Tahun 2009

**) Inflasi bulan April 2015 (yoy)

Dalam upaya mengendalikan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dan TPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Tugas pokok TPID adalah melakukan evaluasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi daerah. Anggota TPID adalah seluruh dinas/instansi/lembaga terkait proses pembentukan inflasi sehingga masing-



masing permasalahan pada kenaikan harga dapat ditekan melalui berbagai penanganan sektoral.

Inflasi Kalimantan Tengah pada bulan April 2015 yang merupakan gabungan dari Kota Palangka Raya dan Kota Sampit sebesar 0,23 persen. Laju inflasi tahun kalender 2015 (Januari-April 2015) sebesar 0,19 persen dan laju inflasi “*year on year*” April 2015 sebesar 5,71 persen.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjaga ekspektasi harga di masyarakat, antara lain dalam bentuk himbauan dan informasi harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui media massa secara intens hingga inisiatif untuk mengadakan pasar alternatif yang beroperasi selama sebulan (pertengahan Desember s.d. awal Januari) yang berfungsi sebagai penyeimbang harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Lokasi pasar penyeimbang yang berdekatan dengan salah satu pasar tradisional terbesar di kota Palangka Raya tersebut sangat diminati oleh masyarakat karena harga yang dijual lebih murah 10-20 persen jika dibandingkan harga di pasar tradisional. Adapun komoditas yang diperdagangkan adalah beberapa jenis komoditas yang sering memicu inflasi, antara lain beras, minyak goreng, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, gula pasir, ikan gabus, daging ayam ras, telur ayam ras, ketimun, minyak tanah dan susu.

Dengan kondisi infrastruktur yang semakin membaik, produksi pangan dan sistem distribusi yang relatif stabil serta didukung dengan keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan rencana aksi yang jelas, maka diperkirakan laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 dapat ditekan menjadi sekitar 4 persen.

Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang membaik. Kriteria Bank Dunia terhadap angka kemiskinan antara lain adalah pemenuhan kalori per hari dibawah 2100 kkal. Analisis kesejahteraan melalui profil kemiskinan memberi gambaran bahwa terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurunnya jumlah penduduk miskin terkait erat dengan adanya upaya pembangunan ekonomi daerah yang terus dilakukan. Meski perlahan, namun pembangunan yang terjadi dapat dikatakan cukup berkualitas. Faktanya terlihat dari *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah kemiskinan dimana persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah terus menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,54 persen setiap tahunnya. Adapun persentase penduduk miskin pada bulan September 2014 sebesar 6,07 persen, menurun tajam jika dibanding tahun 2003 dimana hampir 12 persen penduduk berada pada kategori miskin (memiliki tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan).

Hasil rilis ketenagakerjaan terakhir oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2015 mencapai 1.288.063 orang, bertambah sebanyak 40.293 orang dibanding keadaan Februari 2014 dan bertambah sebanyak 50.971 orang dibanding Februari 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2015 sebesar 3,14 persen, mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2014 maupun TPT Februari 2013 yang besarnya masing-masing mencapai 2,71 persen dan 1,78 persen.



3.1.3. Prospek Ekonomi tahun 2016

Analisis Prospek Ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2016, berdasarkan hasil kajian analisis tersebut Perekonomian Kalimantan Tengah pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh meningkat pada kisaran 7.64-8.14% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi permintaan pada tahun 2016 diperkirakan ditopang oleh meningkatnya investasi dan ekspor, sementara sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral.

Sisi Permintaan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi permintaan didorong oleh sisi investasi dan sisi ekspor. Pertumbuhan investasi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 diperkirakan akan didorong penyelesaian rencana tata ruang dan wilayah provinsi dan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif (pembangunan infrastruktur). Di sisi ekspor tingginya permintaan batu bara akibat peningkatan permintaan dari India dan Jepang serta peningkatan produksi CPO yang disebabkan perbaikan harga CPO di pasar internasional akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekspor di tahun 2016.

Sisi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi sektoral pada tahun 2016, didorong oleh perbaikan kinerja sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan pada tahun tersebut. Penyelesaian RTRWP diperkirakan akan mendorong pertumbuhan investasi subsektor perkebunan dan diperkirakan akan mendorong tingginya kinerja sektor pertanian pada tahun tersebut. Sektor pertambangan diperkirakan meningkat seiring rencana pembangunan beberapa smelter yang akan mendorong produksi komoditas tambang mineral pada tahun 2016. Mengimbangi tingginya produksi TBS pada tahun 2016, diperkirakan akan mendorong perkembangan industri pengolahan seiring membaiknya pasokan energy di Kalimantan Tengah.

Tekanan inflasi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 3,5%-4,5% (yoy). Lebih rendah dibandingkan prakiraan tahun 2015 yang mencapai 4,0%-5,0%. Berkurangnya tekanan inflasi pada tahun 2016 didorong oleh peningkatan produksi pangan sebagai hasil dari program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam rangka mencapai kedaulatan pangan di Kalimantan Tengah terutama pada beberapa komoditas pangan strategis seperti padi, bawang merah, cabai merah, dan daging ayam, perlu disusun roadmap pengembangan komoditas dimaksud.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan salah satu tolok ukur dalam evaluasi penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dimana kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya menjadi gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung dengan mengukur kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD.



3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. Perkiraan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

Pendapatan daerah pada tahun 2016 ditargetkan meningkat sebesar Rp.3.566.754.846.150,00 atau tumbuh sebesar 2,98 persen jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2015, yaitu sebesar Rp.3.463.600.000.000,00. Komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.399.867.367.800,00 dan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.1.421.793.926.700,00 atau naik sebesar 1,57 persen.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp.1.711.928.502.700,00 dan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.1.802.898.604.250,00 atau naik sebesar 5,31 persen.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD Tahun Anggaran 2015, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 351.804.129.500,00. Sedangkan untuk tahun 2016, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 342.062.315.200,00 atau mengalami penurunan sebesar-2,77 persen.

Secara rinci, proyeksi pendapatan daerah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.4.



Tabel 3.4
Perkiraan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Target Tahun 2015 (Rp)	Rancangan RKPD Tahun 2016 (Rp)	Tambah/ Berkurang (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.399.867.367.800,00	1.421.793.926.700,00	21.926.558.900,00	1,57
1.1.1	Pajak Daerah	1.262.556.239.800,00	1.277.775.939.800,00	15.219.700.000,00	1,21
1.1.2	Retribusi Daerah	9.623.378.000,00	8.840.636.900,00	(782.741.100,00)	(8,13)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	37.500.000.000,00	7.500.000.000,00	25,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.687.750.000,00	97.677.350.000,00	(10.400.000,00)	(0,01)
1.2	Dana Perimbangan	1.711.928.502.700,00	1.802.898.604.250,00	90.970.101.550,00	5,31
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	358.806.694.700,00	389.373.301.850,00	30.566.607.150,00	8,52
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.280.595.848.000,00	1.344.625.640.400,00	64.029.792.400,00	5,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	72.525.960.000,00	68.899.662.000,00	(3.626.298.000,00)	(5,00)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	351.804.129.500,00	342.062.315.200,00	(9.741.814.300,00)	(2,77)
1.3.1	Pendapatan Hibah	937.824.000,00	984.715.200,00	46.891.200,00	5,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	337.647.600.000,00	337.647.600.000,00	-	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.218.705.500,00	3.430.000.000,00	(9.788.705.500,00)	(74,05)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		3.463.600.000.000,00	3.566.754.846.150,00	103.154.846.150,00	2,98

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng, 2015.

Adapun hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2011 sampai dengan 2016 disajikan dalam tabel 3.5.



Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2016

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (Rp)				Proyeksi/Target (Rp)	
		Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2012	Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2014	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,1	Pendapatan Asli Daerah	815.244.765.132,56	945.362.708.230,26	1.093.821.486.342,18	1.253.716.040.134,09	1.399.867.367.800,00	1.421.793.926.700,00
1.1.1	Pajak Daerah	707.444.895.193,00	836.503.945.288,00	973.244.830.304,00	1.087.630.497.573,00	1.262.556.239.800,00	1.277.775.939.800,00
1.1.2	Retribusi Daerah	6.493.503.930,00	6.963.110.462,00	7.371.574.609,00	9.065.198.572,00	9.623.378.000,00	8.840.636.900,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.942.190.971,27	22.159.323.820,78	25.298.651.979,25	29.775.553.518,68	30.000.000.000,00	37.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81.364.175.038,29	79.736.328.659,48	87.906.429.449,93	127.244.790.470,41	97.687.750.000,00	7.677.350.000,00
1,2	Dana Perimbangan	1.083.088.116.046,00	1.296.011.128.472,00	1.442.477.673.796,00	1.557.416.499.094,00	1.711.928.502.700,00	1.802.898.604.250,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	235.356.781.046,00	294.570.780.472,00	316.661.423.796,00	343.057.931.094,00	358.806.694.700,00	389.373.301.850,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	795.816.335.000,00	951.256.068.000,00	1.062.516.940.000,00	1.152.428.738.000,00	1.280.595.848.000,00	1.344.625.640.400,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	51.915.000.000,00	50.184.280.000,00	63.299.310.000,00	61.929.830.000,00	72.525.960.000,00	68.899.662.000,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.611.982.000,00	272.657.452.613,52	272.796.978.722,99	318.563.275.960,67	351.804.129.500,00	342.062.315.200,00
1.3.1	Hibah	-	13.842.577.613,52	6.738.335.042,00	8.518.902.456,00	937.824.000,00	984.715.200,00
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.053.571.000,00	3.731.229.000,00	248.391.255.000,00	288.338.823.210,00	337.647.600.000,00	337.647.600.000,00
1.3.4	Dana Intensif Khusus	-	237.425.235.000,00	-	245.077.800.000,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.558.411.000,00	17.658.411.000,00	8.060.349.724,00	13.218.705.500,00	13.218.705.500,00	3.430.000.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	9.607.038.956,99	8.486.844.794,67	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.921.944.863.178,56	2.514.031.289.315,78	2.809.096.138.861,17	3.129.695.815.188,76	3.463.600.000.000,00	3.566.754.846.150,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng 2015



3.2.1.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.3.568.754.846.150,00 dan jika dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.652.064.714.929,00 turun sebesar Rp. 83.309.868.779,00 atau 2,28 persen. Anggaran belanja daerah tahun 2016 Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL), dianggarkan sebesar Rp.1.775.559.786.987,00,- dan jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.738.188.434.929,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.37.371.352.058,00 atau 2,15 persen. Sedangkan komposisi alokasi BTL Tahun Anggaran 2016 terhadap total belanja daerah adalah 50,24 persen.
- b. Belanja Langsung (BL) tahun anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.1.793.195.059.163,00 dan jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.913.876.280.000,00, turun sebesar Rp.120.681.220.837,00) atau turun sebesar 6,31 persen. Sedangkan komposisi alokasi BL Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 49,76 persen terhadap total belanja daerah.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta biaya pemungutan pajak daerah. Belanja Pegawai pada TA. 2016 dianggarkan sebesar Rp.600.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.122.650.000.000 atau 25,69 persen jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.477.350.000.000,00.

**2) Belanja Bunga**

Sama seperti pada tahun 2015, untuk komponen Belanja Bunga pada tahun anggaran 2016 tidak dianggarkan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan pinjaman daerah.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.1.163.300.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.15.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.13.836.700.000,00 atau -92,24%.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.391.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp.135.263.600.000,00 atau -25,95% dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.526.263.600.000,00.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.30.256.445.000,00 atau -37,70% dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.256.445.000,00.

6) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), serta Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi. Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 680.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp.214.876.035.990,00 atau 46,20% dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 465.123.964.010,00.

7) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.50.396.486.987,00 tidak mengalami penurunan sebesar Rp. 121.952.938.932,00 atau -70,76 persen dari plafon belanja yang



sama pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.172.349.425.919,00.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pada tahun 2016, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp.1.155.000.000,00 atau 62,60% dari APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.845.000.000,00

Hasil analisis, perkiraan, realisasi, serta proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2011 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.



Tabel 3. 6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011-2016

No.	Uraian		Realisasi				Target/Proyeksi	
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.		BELANJA DAERAH						
2. 1.		BELANJA TIDAK LANGSUNG	712.053.812.701,45	1.229.065.953.957,83	1.362.464.010.033,04	1.485.163.086.272,34	1.738.188.434.929,00	1.775.559.786.987,00
2. 1. 1.		Belanja Pegawai	294.770.418.869,45	321.002.513.837,00	347.181.664.871,92	385.752.142.447,20	477.350.000.000,00	600.000.000.000,00
2. 1. 2.		Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2. 1. 3.		Belanja Subsidi	20.580.943.220,00	18.438.992.000,00	13.579.962.500,00	13.708.062.000,00	15.000.000.000,00	1.163.300.000,00
2. 1. 4.		Belanja Hibah	21.500.734.502,00	357.148.366.128,00	289.208.314.651,00	332.468.113.483,00	526.263.600.000,00	391.000.000.000,00
2. 1. 5.		Belanja Bantuan Sosial	82.097.683.755,00	116.714.896.904,00	59.463.822.656,00	70.021.615.283,00	80.256.445.000,00	50.000.000.000,00
2. 1. 6.		Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	248.637.424.776,00	372.548.060.707,23	485.973.439.670,12	527.398.944.684,14	465.123.964.010,00	680.000.000.000,00
2. 1. 7.		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	42.852.965.000,00	43.083.828.500,00	165.904.127.529,00	154.846.272.375,00	172.349.425.919,00	50.396.486.987,00
2. 1. 8.		Belanja Tidak Terduga	1.613.642.579,00	129.295.881,60	1.152.678.155,00	967.936.000,00	1.845.000.000,00	3.000.000.000,00
B		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)	712.053.812.701,45	1.229.065.953.957,83	1.362.464.010.033,04	1.485.163.086.272,34	1.738.188.434.929,00	1.775.559.786.987,00
2. 2.		BELANJA LANGSUNG	812.290.457.781,83	1.122.281.365.802,00	1.517.050.224.813,49	1.743.463.357.459,12	1.913.876.280.000,00	1.793.195.059.163,00
2. 2. 1.		Belanja Pegawai	64.050.675.463,00	65.931.228.813,00	67.013.949.449,00	71.261.103.035,00	140.208.739.098,00	98.744.024.169,00
2. 2. 2.		Belanja Barang dan Jasa	315.899.789.947,83	420.535.875.080,00	509.795.274.708,49	857.759.114.414,23	792.941.657.568,00	792.941.657.568,00
2. 2. 3.		Belanja Modal	432.339.992.371,00	635.814.261.909,00	940.241.000.656,00	814.443.140.009,89	980.725.883.334,00	901.509.377.426,00
C		JUMLAH BELANJA LANGSUNG	812.290.457.781,83	1.122.281.365.802,00	1.517.050.224.813,49	1.743.463.357.459,12	1.913.876.280.000,00	1.793.195.059.163,00
D		JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)	1.524.344.270.483,28	2.351.347.319.759,83	2.879.514.234.846,53	3.228.626.443.731,46	3.652.064.714.929,00	3.568.754.846.150,00

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 2015.



3.2.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), yang dianggarkan sebesar Rp.87.000.000.000,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp.156.464.714.929,00 (64,27%) jika dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.243.464.714.929,00). Untuk komponen lainnya dari penerimaan pembiayaan yang meliputi pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang pada tahun 2016 tidak dianggarkan.

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.85.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.30.000.000.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.55.000.000.000,00. Seluruh pengeluaran pembiayaan tahun 2016 ini bersumber dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan yang meliputi pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok hutang, serta pemberian pinjaman tidak dianggarkan pada tahun 2016.

Dengan posisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.87.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.85.000.000.000,00, maka pembiayaan netto menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,00, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2011 sampai dengan 2016 disajikan pada **tabel 3.7**. Sedangkan perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2011 s.d. 2016 terlihat pada **tabel 3.8**. Kemudian pada realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, dirangkum dalam tabel realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2016, sebagaimana terlihat pada **tabel 3.9**. Terakhir, terkait kerangka pendanaan keuangan daerah tahun 2016 dalam struktur RAPBD TA. 2016 disajikan pada **tabel 3.10**.



Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016

No.	Uraian	Realisasi				Target/Proyeksi	
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH						
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	132.100.592.485,21	451.570.297.936,49	559.289.889.435,44	386.704.833.374,02	243.464.714.929,00	87.000.000.000,00
3. 1. 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	132.100.592.485,21	451.570.297.936,49	559.289.889.435,44	386.704.833.374,02	193.464.714.929,00	87.000.000.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	50.000.000.000,00	-
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (3.1.1 s/d 3.1.6)		132.100.592.485,21	451.570.297.936,49	559.289.889.435,44	386.704.833.374,02	243.464.714.929,00	87.000.000.000,00

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 2015.



Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016

No.			Uraian	Realisasi				Proyeksi	
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.			PEMBIAYAAN DAERAH						
3.	2.		Pengeluaran Pembiayaan	78.096.591.601,00	55.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100.500.000.000,00	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00
3.	2.	1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-
3.	2.	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	40.000.000.000,00	38.000.000.000,00	85.500.000.000,00	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00
3.	2.	3	Pembayaran Pokok Utang	63.096.591.601,00	-	-	-	-	-
3.	2.	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (3.2.1 s/d 3.2.4)				78.096.591.601,00	55.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100.500.000.000,00	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00
Pembiayaan Netto				54.004.000.884,21	396.570.297.936,49	506.289.889.435,44	286.204.833.374,02	188.464.714.929,00	2.000.000.000,00

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 2015.



Tabel 3.9

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016

No.	URAIAN	Realisasi (Rp)				Proyeksi/Target (Rp)	
		Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2012	Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2014	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	815.244.765.132,56	945.362.708.230,26	1.093.580.529.414,03	1.253.716.040.134,09	1.399.867.367.800,00	1.421.793.926.700,00
1.1.1	Pajak Daerah	707.444.895.193,00	836.503.945.288,00	973.244.830.304,00	1.087.630.497.573,00	1.262.556.239.800,00	1.277.775.939.800,00
1.1.2	Retribusi Daerah	6.493.503.930,00	6.963.110.462,00	7.574.700.809,00	9.065.198.572,00	9.623.378.000,00	8.840.636.900,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.942.190.971,27	22.159.323.820,78	25.328.651.979,25	29.775.553.518,68	30.000.000.000,00	37.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81.364.175.038,29	79.736.328.659,48	87.432.346.321,78	127.244.790.470,41	97.687.750.000,00	97.677.350.000,00
1.2	Dana Perimbangan	1.083.088.116.046,00	1.296.011.128.472,00	1.442.477.673.796,00	1.557.416.499.094,00	1.711.928.502.700,00	1.802.898.604.250,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	235.356.781.046,00	294.570.780.472,00	316.661.423.796,00	343.057.931.094,00	358.806.694.700,00	389.373.301.850,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	795.816.335.000,00	951.256.068.000,00	1.062.516.940.000,00	1.152.428.738.000,00	1.280.595.848.000,00	1.344.625.640.400,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	51.915.000.000,00	50.184.280.000,00	63.299.310.000,00	61.929.830.000,00	72.525.960.000,00	68.899.662.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.611.982.000,00	272.657.452.613,52	272.957.930.235,17	318.563.275.960,67	351.804.129.500,00	342.062.315.200,00
1.3.1	Hibah	-	13.842.577.613,52	16.506.325.511,17	8.518.902.456,00	937.824.000,00	984.715.200,00
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.053.571.000,00	3.731.229.000,00	5.907.060.000,00	288.338.823.210,00	337.647.600.000,00	337.647.600.000,00
1.3.4	Dana Intensif Khusus	-	237.425.235.000,00	242.484.195.000,00	245.077.800.000,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.558.411.000,00	17.658.411.000,00	8.060.349.724,00	13.218.705.500,00	13.218.705.500,00	3.430.000.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	8.486.844.794,67	-	-
A	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.921.944.863.178,56	2.514.031.289.315,78	2.809.016.133.445,20	3.129.695.815.188,76	3.463.600.000.000,00	3.566.754.846.150,00



No.	URAIAN	Realisasi (Rp)				Proyeksi/Target (Rp)	
		Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2012	Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2014	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2016
2.	BELANJA DAERAH						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	712.053.812.701,45	1.229.065.953.957,83	1.362.464.010.033,04	1.485.163.086.272,34	1.738.188.434.929,00	1.775.559.786.987,00
2.1.1	Belanja Pegawai	294.770.418.869,45	321.002.513.837,00	347.181.664.871,92	385.752.142.447,20	477.350.000.000,00	600.000.000.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	20.580.943.220,00	18.438.992.000,00	13.579.962.500,00	13.708.062.000,00	15.000.000.000,00	1.163.300.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	21.500.734.502,00	357.148.366.128,00	289.208.314.651,00	332.468.113.483,00	526.263.600.000,00	391.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	82.097.683.755,00	116.714.896.904,00	59.463.822.656,00	70.021.615.283,00	80.256.445.000,00	50.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	248.637.424.776,00	372.548.060.707,23	485.973.439.670,12	527.398.944.684,14	465.123.964.010,00	680.000.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	42.852.965.000,00	43.083.828.500,00	165.904.127.529,00	154.846.272.375,00	172.349.425.919,00	50.396.486.987,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.613.642.579,00	129.295.881,60	1.152.678.155,00	967.936.000,00	1.845.000.000,00	3.000.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)	712.053.812.701,45	1.229.065.953.957,83	1.362.464.010.033,04	1.485.163.086.272,34	1.738.188.434.929,00	1.775.559.786.987,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	812.290.457.781,83	1.122.281.365.802,00	1.517.050.224.813,49	1.743.463.357.459,12	1.913.876.280.000,00	1.793.195.059.163,00
2.2.1	Belanja Pegawai	64.050.675.463,00	65.931.228.813,00	67.013.949.449,00	71.261.103.035,00	140.208.739.098,00	98.744.024.169,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315.899.789.947,83	420.535.875.080,00	509.795.274.708,49	857.759.114.414,23	792.941.657.568,00	792.941.657.568,00
2.2.3	Belanja Modal	432.339.992.371,00	635.814.261.909,00	940.241.000.656,00	814.443.140.009,89	980.725.883.334,00	901.509.377.426,00
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN	812.290.457.781,83	1.122.281.365.802,00	1.517.050.224.813,49	1.743.463.357.459,12	1.913.876.280.000,00	1.793.195.059.163,00
D	JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)	1.524.344.270.483,00	2.351.347.319.759,83	2.879.514.234.846,53	3.228.626.443.731,46	3.652.064.714.929,00	3.568.754.846.150,00
E	Surplus/Defisit (A - D)	397.600.592.695,28	162.683.969.555,95	(70.498.101.401,33)	(98.930.628.542,70)	(188.464.714.929,00)	(2.000.000.000,00)



No.	URAIAN	Realisasi (Rp)				Proyeksi/Target (Rp)	
		Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2012	Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2014	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2016
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	132.100.592.485,21	451.570.297.936,49	559.289.889.435,44	386.704.833.374,02	243.464.714.929,00	87.000.000.000,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	132.100.592.485,21	451.605.919.879,49	559.289.889.435,44	386.704.833.374,02	193.464.714.929,00	87.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	50.000.000.000,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
F	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (3.1.1 s/d 3.1.6)	132.100.592.485,21	451.570.297.936,49	559.289.889.435,44	386.704.833.374,02	243.464.714.929,00	87.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	78.096.591.601,00	55.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100.500.000.000,00	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	40.000.000.000,00	38.000.000.000,00	85.500.000.000,00	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	63.096.591.601,00	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
G	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (3.2.1 s/d 3.2.4)	78.096.591.601,00	55.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100.500.000.000,00	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00
H	Pembiayaan Netto (F-G)	54.004.000.884,21	396.570.297.936,49	506.289.889.435,44	286.204.833.374,02	188.464.714.929,00	2.000.000.000,00

Sumber : 1. Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng, 2015; 2. Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 2015



Tabel 3.10
Struktur Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No.			Uraian	APBD TA. 2015	Kerangka Pendanaan Tahun 2016	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1			PENDAPATAN DAERAH				
1.	1.		PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.399.867.367.800,00	1.421.793.926.700,00	21.926.558.900,00	1,57
1.	1.	1.	Pajak Daerah	1.262.556.239.800,00	1.277.775.939.800,00	15.219.700.000,00	1,21
1.	1.	2.	Retribusi Daerah	9.623.378.000,00	8.840.636.900,00	(782.741.100,00)	(8,13)
1.	1.	3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	37.500.000.000,00	7.500.000.000,00	25,00
1.	1.	4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.687.750.000,00	97.677.350.000,00	(10.400.000,00)	(0,01)
1.	2.		DANA PERIMBANGAN	1.711.928.502.700,00	1.802.898.604.250,00	90.970.101.550,00	5,31
1.	2.	1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	358.806.694.700,00	389.373.301.850,00	30.566.607.150,00	8,52
1.	2.	2.	Dana Alokasi Umum	1.280.595.848.000,00	1.344.625.640.400,00	64.029.792.400,00	5,00
1.	2.	3.	Dana Alokasi Khusus	72.525.960.000,00	68.899.662.000,00	(3.626.298.000,00)	(5,00)
1.	3.		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	351.804.129.500,00	342.062.315.200,00	(9.741.814.300,00)	(2,77)
1.	3.	1.	Pendapatan Hibah	937.824.000,00	984.715.200,00	46.891.200,00	5,00
1.	3.	4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	337.647.600.000,00	337.647.600.000,00	0,00	0,00
1.	3.	5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.218.705.500,00	3.430.000.000,00	(9.788.705.500,00)	(74,05)
A			JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3)	3.463.600.000.000,00	3.566.754.846.150,00	103.154.846.150,00	2,98



No.	Uraian		APBD TA. 2015	Kerangka Pendanaan Tahun 2016	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2.		BELANJA DAERAH				
2. 1.		BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.738.188.434.929,00	1.775.559.786.987,00	37.371.352.058,00	2,15
2.	1.	1. Belanja Pegawai	477.350.000.000,00	600.000.000.000,00	122.650.000.000,00	25,69
2.	1.	2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	3. Belanja Subsidi	15.000.000.000,00	1.163.300.000,00	(13.836.700.000,00)	(92,24)
2.	1.	4. Belanja Hibah	526.263.600.000,00	391.000.000.000,00	(135.263.600.000,00)	(25,70)
2.	1.	5. Belanja Bantuan Sosial	80.256.445.000,00	50.000.000.000,00	(30.256.445.000,00)	(37,70)
2.	1.	6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	465.123.964.010,00	680.000.000.160,00	214.876.035.990,00	46,20
2.	1.	7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	172.349.425.919,00	50.396.486.987,00	(121.952.938.932,00)	(70,76)
2.	1.	8. Belanja Tidak Terduga	1.845.000.000,00	3.000.000.000,00	1.155.000.000,00	62,60
B		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)	1.738.188.434.929,00	1.775.559.786.987,00	37.371.352.058,00	2,15
2. 2.		BELANJA LANGSUNG	1.913.876.280.000,00	1.793.195.059.163,00	(120.681.220.837,00)	(6,31)
2.	2.	1. Belanja Pegawai	140.208.739.098,00	98.744.024.169,00	(41.464.714.929,00)	(29,57)
2.	2.	2. Belanja Barang dan Jasa	792.941.657.568,00	792.941.657.568,00	0,00	0,00
2.	2.	3. Belanja Modal	980.725.883.334,00	901.509.377.426,00	(79.216.505.908,00)	(8,08)
C		JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN	1.913.876.280.000,00	1.793.195.059.163,00	(120.681.220.837,00)	(6,31)
D		JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)	3.652.064.714.929,00	3.568.754.846.150,00	(83.309.868.779,00)	2,28
E		Surplus/Defisit (A - D)	(188.464.714.929,00)	(2.000.000.000,00)	186.464.714.929,00	(98,94)



No.	Uraian		APBD TA. 2015	Kerangka Pendanaan Tahun 2016	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
3.		PEMBIAYAAN DAERAH				
3.	1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	243.464.714.929,00	87.000.000.000,00	(156.464.714.929,00)	(64,27)
3.	1.	1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	193.464.714.929,00	87.000.000.000,00	(106. 464.714.929,00)	(55,03)
3.	1.	2 Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	0,00	(50.000.000.000,00)	(100,00)
3.	1.	3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	1.	4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	1.	5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	1.	6 Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
F		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)	243.464.714.929,00	87.000.000.000,00	(156.464.714.929,00)	(64,27)
3.	2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00	30.000.000.000,00	
3.	2.	1 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2.	2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00	0,00
3.	2.	3 Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2.	4 Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
G		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)	55.000.000.000,00	85.000.000.000,00	30.000.000.000,00	54,55
H		Pembiayaan Netto (F - G)	188.464.714.929,00	2.000.000.000,00	(186.464.714.929,00)	(98,94)
I		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H + E)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : 1. Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng, 2015; dan 2. Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 2015



3.2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

A. Arah kebijakan pendapatan daerah

Arah kebijakan pada pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Peningkatan pelayanan publik pada Kantor Bersama Samsat; dan
- 3) Peningkatan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah. Selain itu, berbagai regulasi kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah menjadi poin penting pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. Arah kebijakan belanja daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input perencanaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah;



4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang optimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk investasi di bidang pendidikan; dan
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur berdasarkan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap program prioritas harus memiliki dasar dalam penganggaran agar tidak terjadi inefisiensi pendanaan kegiatan.

C. Arah kebijakan pembiayaan daerah

Kebijakan umum terkait pembiayaan pada pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi piutang daerah dan pencairan dana cadangan. Selain itu, semaksimal mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah; dan
3. Diusahakan agar sumber pengeluaran pembiayaan daerah hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.